



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOKI JILIANSYAH
2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. NHK : 975738

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/30 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 383 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5D EXCEED Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SY 415 BALENO DX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2S6 JUFITER MX 135 CC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 100 D (SUPRA X) Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO M3 - SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOTOR, HONDA NINO2Q43LI A/T - ADV Tahun 2022, HASIL



SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.525.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.525.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.